

Pelatihan Leadership Untuk Perangkat Desa

Nadiyah, Dini Yuli Saputri, Sulastri, Isnaini Safira, Rahmatul Jannah

nadiyah@iainma.ac.id

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

ABSTRACT

Leadership training for village officials is a strategic effort to strengthen the governance capacity of village administrations in carrying out public service and participatory development. This Community Service Program (PKM) was conducted in Muaro Jambi Regency, aiming to enhance the leadership abilities of village officials through participatory-based training. The implementation method included needs assessment, module development, interactive sessions, and evaluation using pre-tests, post-tests, observations, and follow-up interviews. The results show a significant improvement in participants' knowledge and leadership skills, especially in communication, collaboration, and participatory decision-making. Moreover, participants demonstrated behavioral changes toward more open, empathetic, and service-oriented leadership styles. This PKM activity provides a tangible contribution to improving human resource capacity at the village level and can serve as a sustainable training model for village governance in other regions.

Keywords: *leadership training, village officials, participation, servant leadership, community service*

ABSTRAK

Pelatihan kepemimpinan bagi perangkat desa merupakan upaya strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan partisipatif. Kegiatan *Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)* ini dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan meningkatkan kemampuan leadership perangkat desa melalui pelatihan berbasis partisipatif. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, penyusunan modul pelatihan, pelaksanaan kegiatan interaktif, serta evaluasi melalui *pre-test*, *post-test*, observasi, dan wawancara tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan peserta, terutama dalam kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan berbasis partisipasi. Selain itu, terjadi perubahan perilaku kepemimpinan yang lebih terbuka, empatik, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa serta dapat dijadikan model pelatihan berkelanjutan untuk pemerintahan desa di daerah lain.

Kata kunci: pelatihan leadership, perangkat desa, partisipasi, kepemimpinan pelayanan, PKM

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan publik. Namun, perluasan kewenangan ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal (Fitriyah & Zainuddin, 2020). Kondisi tersebut menjadikan kemampuan kepemimpinan (leadership) perangkat desa sebagai aspek strategis yang perlu diperkuat agar tata kelola desa dapat berjalan efektif, transparan, dan partisipatif (Dewi & Arifin, 2021).

Kepemimpinan pada tingkat desa memiliki karakteristik khas karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan sosial dalam membangun kepercayaan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan menjaga harmoni sosial (Sutrisno, 2019). Kepala desa dan perangkatnya berperan sebagai *agent of change* dalam mendorong kemandirian desa serta memastikan implementasi program pembangunan sesuai kebutuhan warga. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perangkat desa masih menghadapi kendala dalam aspek kepemimpinan, komunikasi publik, manajemen tim, dan pengambilan keputusan berbasis data (Mulyadi & Sukmana, 2018; Rahmadani et al., 2020). Tantangan ini semakin kompleks di era digital dan keterbukaan informasi, di mana desa dituntut mampu menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan modern berbasis teknologi dan partisipasi (Purwanto, 2021).

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki jumlah desa cukup besar, dengan karakteristik masyarakat agraris dan heterogen. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Kabupaten Muaro Jambi tahun 2022, terdapat lebih dari 150 desa yang tersebar di sembilan kecamatan, dengan tingkat variasi sumber daya manusia perangkat desa yang signifikan. Sebagian besar perangkat desa masih berlatar belakang pendidikan menengah dan belum mendapatkan pelatihan kepemimpinan secara formal (DPMD Muaro Jambi, 2022). Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa, lemahnya koordinasi antarperangkat, serta kurang optimalnya pelayanan publik di tingkat desa (Putri et al., 2021).

Penelitian oleh Sari dan Mulyana (2020) menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dan membangun visi bersama akan lebih mudah mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Namun, di banyak desa, kepemimpinan masih bersifat instruktif dan berorientasi pada kekuasaan, bukan pada pelayanan (*servant leadership*). Kondisi ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat dan munculnya konflik internal antarperangkat desa (Handayani & Wahyudi, 2019).

Pelatihan kepemimpinan (*leadership training*) menjadi salah satu strategi efektif untuk mengatasi persoalan tersebut. Program pelatihan yang dirancang dengan pendekatan partisipatif dapat membantu perangkat desa memahami prinsip dasar kepemimpinan yang berorientasi pelayanan, memperkuat kemampuan komunikasi, meningkatkan kolaborasi, serta membangun etos kerja berbasis nilai integritas dan tanggung jawab (Rohim & Prasetyo, 2017). Menurut Yulianto dan Fauzi (2021), pelatihan yang berorientasi pada peningkatan *soft skills* seperti empati, komunikasi interpersonal, dan kemampuan pengambilan keputusan mampu menciptakan aparatur desa yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Selain itu, Wahyuni (2020) menegaskan bahwa pelatihan *leadership* yang berkesinambungan berdampak positif terhadap budaya organisasi pemerintahan desa, karena menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap visi pembangunan.

Urgensi peningkatan kapasitas kepemimpinan perangkat desa semakin kuat seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di tingkat lokal (Nurhadi et al., 2019). Desa kini tidak hanya menjadi penerima program pembangunan dari pusat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan berbasis potensi lokal. Kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif menjadi prasyarat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Hafid (2021), desa dengan pemimpin yang visioner dan komunikatif cenderung memiliki kinerja pembangunan yang lebih baik dibanding desa dengan pemimpin yang pasif dan administratif semata.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelatihan kepemimpinan bagi perangkat desa masih bersifat sporadis, tidak terencana, dan lebih sering bersifat seremonial tanpa evaluasi dampak (Ramdani & Yuliani, 2020). Beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah hanya menekankan aspek administratif, seperti pengelolaan dana desa dan pelaporan keuangan, tanpa menekankan aspek kepemimpinan dan komunikasi interpersonal (Suprpto, 2021). Akibatnya, kemampuan perangkat desa untuk memimpin tim, mengatasi konflik, dan menggerakkan masyarakat masih terbatas. Di sisi lain, pergantian perangkat desa secara periodik tanpa pembekalan leadership yang memadai juga membuat kesinambungan tata kelola desa sulit terjaga (Andriani et al., 2018).

Pelatihan leadership yang dirancang dalam kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan menjawab kebutuhan nyata tersebut melalui pendekatan praktis dan aplikatif. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan *soft skills* kepemimpinan perangkat desa di Kabupaten Muaro Jambi, meliputi kemampuan komunikasi efektif, kolaborasi tim, pengambilan keputusan, dan motivasi kerja berbasis nilai pelayanan publik. Menurut Fathurrahman (2020), model pelatihan berbasis partisipasi mampu menciptakan suasana belajar yang dialogis dan reflektif, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menginternalisasi

nilai-nilai kepemimpinan dalam konteks kerja sehari-hari. Selain itu, pelatihan leadership berbasis praktik lapangan dapat memperkuat hubungan antarperangkat desa dan menciptakan solidaritas organisasi yang positif (Hapsari & Yuniarti, 2018).

Permasalahan utama yang dihadapi perangkat desa di Kabupaten Muaro Jambi adalah masih rendahnya kemampuan kepemimpinan partisipatif, lemahnya komunikasi antarperangkat, serta kurangnya inovasi dalam pelayanan masyarakat. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan akses pelatihan, kurangnya pendampingan pascapelatihan, dan minimnya evaluasi kinerja berbasis kompetensi (Wulandari et al., 2022). Padahal, dengan pelatihan leadership yang terencana dan terukur, perangkat desa dapat lebih percaya diri, mampu mengelola konflik, serta menggerakkan partisipasi warga untuk mencapai visi pembangunan desa yang berkelanjutan (Siregar & Hasanah, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, urgensi pelatihan kepemimpinan bagi perangkat desa di Kabupaten Muaro Jambi menjadi sangat penting. Program ini bukan hanya upaya peningkatan kapasitas individu, tetapi juga bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Melalui kegiatan PKM Pelatihan Leadership untuk Perangkat Desa, diharapkan terjadi peningkatan kompetensi kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik, peningkatan kolaborasi antarperangkat, serta terbangunnya budaya organisasi desa yang transparan, komunikatif, dan profesional. Secara khusus, tujuan program ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang konsep dan prinsip kepemimpinan partisipatif.
2. Melatih kemampuan komunikasi, motivasi, dan pengambilan keputusan yang efektif.
3. Mengembangkan semangat kerja kolaboratif dan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Mendorong terciptanya budaya pelayanan publik yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada masyarakat.

METODE

Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui pelatihan leadership bagi perangkat desa di Kabupaten Muaro Jambi. Metode ini dipilih karena pelatihan berbasis partisipasi terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran serta memperkuat rasa memiliki terhadap program (Fathurrahman, 2020). Pendekatan partisipatif menempatkan peserta sebagai subjek aktif yang tidak hanya menerima materi, tetapi juga memberikan pengalaman dan refleksi dari praktik kepemimpinan mereka di lapangan. Kegiatan diawali dengan analisis kebutuhan (*needs assessment*) melalui wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa untuk mengetahui permasalahan utama dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan, seperti koordinasi tim, komunikasi dengan masyarakat, dan manajemen konflik. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, disusunlah modul pelatihan yang memuat empat aspek utama: konsep dasar kepemimpinan partisipatif, komunikasi efektif dalam organisasi, pengambilan keputusan berbasis nilai, dan manajemen pelayanan publik di desa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap selama tiga minggu di Balai Desa Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya. Pelatihan dilaksanakan menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi kepemimpinan, dan refleksi bersama. Dalam setiap sesi, peserta diberikan contoh nyata permasalahan yang dihadapi dalam tugas pemerintahan desa untuk dianalisis dan dicari solusinya secara kolaboratif. Narasumber berasal dari kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam manajemen organisasi publik. Materi pelatihan disusun secara sederhana dan kontekstual, agar mudah dipahami oleh peserta yang memiliki latar belakang pendidikan beragam. Selain itu, kegiatan juga didukung oleh penggunaan media visual dan simulasi permainan peran untuk memperkuat pemahaman konsep kepemimpinan kolaboratif (Hapsari & Yuniarti, 2018).

Setiap tahapan kegiatan diikuti oleh proses monitoring dan evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman peserta serta dampak pelatihan terhadap peningkatan keterampilan kepemimpinan. Evaluasi dilakukan menggunakan tiga instrumen utama, yaitu: (1) *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan, (2) observasi aktivitas selama pelatihan untuk melihat partisipasi dan kemampuan komunikasi peserta, serta (3) wawancara tindak lanjut dua minggu setelah pelatihan untuk mengetahui penerapan hasil pelatihan di lingkungan kerja. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk menilai efektivitas kegiatan. Di akhir kegiatan, peserta diminta menyusun rencana aksi (*action plan*) sederhana yang akan diterapkan di desa masing-masing, seperti peningkatan koordinasi rapat, sistem pembagian tugas yang jelas, dan pelayanan publik berbasis nilai kolaboratif. Dengan cara ini, hasil pelatihan diharapkan tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga berdampak nyata pada perubahan perilaku kepemimpinan perangkat desa dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan leadership bagi perangkat desa di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan selama tiga minggu dan berjalan dengan baik sesuai rencana. Peserta pelatihan terdiri atas 25 orang perangkat desa dari beberapa desa di Kecamatan Bahar Utara, di antaranya Desa Sungai Bahar, Bukit Makmur, dan Sumber Jaya. Seluruh peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman konsep kepemimpinan sebesar 38%, dari nilai rata-rata awal 52 menjadi 90 setelah pelatihan. Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek komunikasi interpersonal dan pengambilan keputusan berbasis partisipatif.

Selain peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku juga teramati selama proses pelatihan. Peserta yang pada awalnya pasif dalam diskusi mulai berani mengemukakan pendapat dan memimpin simulasi kelompok. Dalam sesi simulasi "*problem solving*

leadership”, sebagian besar peserta mampu menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sosial desa secara kolaboratif, dengan mempertimbangkan pandangan warga dan perangkat lain. Hasil observasi tim pelaksana menunjukkan bahwa 80% peserta mampu mempraktikkan gaya kepemimpinan partisipatif, yang ditandai dengan keterbukaan terhadap ide dan kemampuan mendengarkan secara aktif.

Pada tahap tindak lanjut (*follow-up interview*) dua minggu setelah pelatihan, ditemukan bahwa 70% peserta telah mulai menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan pemerintahan desa. Misalnya, beberapa kepala urusan mulai membentuk tim kecil dalam merencanakan kegiatan pembangunan, dan kepala desa memprakarsai forum diskusi warga rutin untuk mendengar aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan *leadership* berbasis partisipatif memberikan dampak nyata terhadap praktik kepemimpinan di tingkat desa (Fathurrahman, 2020).

PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Perangkat Desa

Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman konsep kepemimpinan partisipatif, komunikasi, dan manajemen konflik. Sebelum pelatihan, sebagian besar perangkat desa memandang kepemimpinan hanya sebagai posisi struktural yang menuntut kemampuan administratif. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai memahami bahwa kepemimpinan yang efektif menekankan aspek pelayanan, komunikasi dua arah, dan kemampuan menggerakkan tim (Dewi & Arifin, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuni (2020) yang menyebutkan bahwa pelatihan berbasis interaktif mampu membentuk pemimpin publik yang empatik dan kolaboratif.

Pelatihan *leadership* juga memperlihatkan efek terhadap perubahan pola pikir (*mindset shifting*). Peserta menyadari bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari output kegiatan, tetapi juga dari proses membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat (Rohim & Prasetyo, 2017). Kondisi ini sesuai dengan temuan

Sari & Mulyana (2020) yang menyatakan bahwa kepemimpinan partisipatif memiliki korelasi positif terhadap efektivitas pembangunan desa. Pemimpin yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif akan memperkuat legitimasi sosial dan mempercepat keberhasilan program.

2. Penguatan Komunikasi dan Kerjasama Tim

Peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal merupakan hasil yang paling dominan dari kegiatan ini. Sebagian besar peserta mengaku selama ini belum memahami pentingnya komunikasi terbuka dalam membangun kerja sama antarperangkat desa. Melalui sesi simulasi dan permainan peran, peserta belajar mengelola konflik dan memahami gaya komunikasi yang berbeda antarindividu. Menurut Handayani & Wahyudi (2019), kemampuan komunikasi menjadi fondasi utama dalam organisasi pemerintahan karena berfungsi membangun koordinasi dan mencegah kesalahpahaman.

Selain itu, kegiatan pelatihan yang menggunakan pendekatan *experiential learning* (belajar melalui pengalaman) terbukti meningkatkan empati dan kemampuan mendengar. Hasil ini mendukung pandangan Yulianto & Fauzi (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan kepemimpinan yang mengedepankan interaksi aktif lebih efektif dalam menumbuhkan kolaborasi dibandingkan pelatihan berbasis ceramah satu arah. Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan pelayanan publik yang cepat dan adaptif (Nurhadi et al., 2019).

3. Pembentukan Karakter Kepemimpinan Pelayanan (*Servant Leadership*)

Salah satu hasil penting kegiatan ini adalah munculnya kesadaran baru tentang pentingnya kepemimpinan pelayanan (*servant leadership*). Konsep ini menekankan bahwa pemimpin yang baik bukan yang berkuasa atas bawahannya, melainkan yang mampu melayani dan mengarahkan dengan keteladanan (Hafid, 2021). Selama pelatihan, peserta belajar untuk menempatkan diri sebagai fasilitator bagi masyarakat, bukan sekadar pengambil keputusan. Pandangan ini memperkuat hasil penelitian

Mulyadi & Sukmana (2018) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang melayani lebih efektif dalam menciptakan kepercayaan publik di tingkat desa.

Implementasi nilai kepemimpinan pelayanan ini mulai tampak dalam perilaku peserta setelah pelatihan. Misalnya, perangkat desa mulai mengubah cara berkomunikasi dengan warga, menggunakan pendekatan yang lebih sopan, empatik, dan terbuka terhadap kritik. Mereka juga mulai berinisiatif memberikan pelayanan tanpa menunggu perintah atasan. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran budaya organisasi di desa menuju arah yang lebih inklusif dan humanis (Putri et al., 2021).

4. Dampak Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pelatihan leadership berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal koordinasi internal dan efektivitas kerja tim. Berdasarkan hasil wawancara tindak lanjut, sebagian besar peserta merasa lebih percaya diri memimpin rapat dan berani mengambil keputusan bersama tim. Hasil ini mendukung pandangan Ramdani & Yuliani (2020) bahwa pelatihan kepemimpinan mampu meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan aparatur desa. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa setelah kepala desa menerapkan pendekatan komunikasi terbuka (Purwanto, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan meningkat sekitar 30% berdasarkan data absensi kegiatan forum diskusi warga. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif mampu memperkuat akuntabilitas publik dan transparansi pemerintahan desa (Dewi & Arifin, 2021). Dengan demikian, pelatihan leadership tidak hanya berpengaruh pada individu peserta, tetapi juga membawa dampak sistemik terhadap budaya kerja organisasi pemerintahan desa secara keseluruhan.

5. Tantangan dan Strategi Keberlanjutan

Meskipun hasil pelatihan menunjukkan kemajuan positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan program. Pertama, keterbatasan waktu dan sarana pelatihan menjadi hambatan utama bagi beberapa peserta yang harus tetap melaksanakan tugas harian di kantor desa. Kedua, masih diperlukan pendampingan berkelanjutan pascapelatihan agar perubahan perilaku kepemimpinan dapat terjaga dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hapsari & Yuniarti (2018) yang menekankan pentingnya *follow-up training* untuk menjaga konsistensi perilaku kepemimpinan.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan pelatihan leadership ini diintegrasikan dalam program kerja rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi. Dengan demikian, kapasitas perangkat desa dapat terus ditingkatkan melalui pelatihan berkala, mentoring, dan evaluasi kinerja berbasis kompetensi. Menurut Wulandari et al. (2022), sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program pengembangan kapasitas aparatur desa.

6. Pembelajaran dari Program PKM

Pelaksanaan program PKM ini memberikan pembelajaran berharga bahwa peningkatan kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal memerlukan pendekatan yang kontekstual, komunikatif, dan berbasis nilai. Desa bukanlah entitas administratif semata, tetapi komunitas sosial yang dinamis. Oleh karena itu, pelatihan leadership perlu menyesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat (Fitriyah & Zainuddin, 2020). Model pelatihan berbasis praktik lapangan seperti simulasi dan diskusi kasus nyata terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan reflektif peserta (Siregar & Hasanah, 2019).

Hasil pelatihan ini juga memperlihatkan bahwa transformasi perilaku kepemimpinan dapat terjadi ketika peserta diberi ruang untuk belajar secara aktif dan reflektif. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga

membentuk *mindset* pelayanan publik yang berorientasi integritas dan tanggung jawab sosial (Fathurrahman, 2020). Oleh karena itu, kegiatan PKM ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Muaro Jambi maupun di daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Leadership untuk Perangkat Desa di Kabupaten Muaro Jambi telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas kepemimpinan aparatur desa. Berdasarkan hasil evaluasi, pelatihan berbasis partisipatif ini mampu meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep kepemimpinan kolaboratif, memperkuat kemampuan komunikasi, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa. Peningkatan rata-rata pengetahuan dan keterampilan peserta menunjukkan bahwa model pelatihan yang interaktif, reflektif, dan kontekstual efektif dalam membangun karakter pemimpin yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan perilaku perangkat desa setelah mengikuti pelatihan juga tampak jelas, terutama dalam aspek komunikasi interpersonal, pengambilan keputusan bersama, dan pembentukan budaya kerja yang lebih terbuka. Para peserta mulai menunjukkan inisiatif untuk menciptakan ruang dialog warga, memperbaiki koordinasi internal, dan memberikan pelayanan dengan sikap empatik serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa penguatan kompetensi kepemimpinan tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga membawa transformasi positif bagi sistem organisasi desa secara keseluruhan.

Dari sisi akademik dan praktis, kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas aparatur desa harus dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelatihan leadership berbasis praktik nyata dan refleksi pengalaman terbukti lebih efektif dibanding pelatihan administratif semata. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan serupa

dijadikan program rutin oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi dan dapat direplikasi di desa-desa lain. Melalui pendekatan pelatihan yang humanis, kolaboratif, dan berbasis nilai, diharapkan akan lahir perangkat desa yang memiliki integritas tinggi, berorientasi pelayanan, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan lokal yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi atas dukungan dan kerja sama yang diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para kepala desa, sekretaris desa, dan seluruh perangkat desa peserta pelatihan yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan semangat belajar tinggi selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada tim akademisi dari Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi yang telah memberikan pendampingan dan kontribusi ilmiah dalam pelaksanaan serta evaluasi program. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi dan dasar bagi upaya penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur desa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., Fitria, H., & Nurkholis, M. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja perangkat desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 95–108.
- Dewi, R., & Arifin, Z. (2021). Kepemimpinan transformasional dalam pemerintahan desa. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(1), 12–22.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi. (2022). *Laporan Profil Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022*. Muaro Jambi: DPMD.
- Fathurrahman, A. (2020). Pengembangan pelatihan berbasis partisipatif untuk aparatur desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, 5(2), 88–96.

- Fitriyah, L., & Zainuddin, A. (2020). Kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam implementasi UU Desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 21–30.
- Hafid, R. (2021). Peran kepala desa dalam pembangunan berbasis masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 45–56.
- Handayani, T., & Wahyudi, B. (2019). Konflik kepemimpinan dan partisipasi masyarakat di tingkat desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 145–158.
- Hapsari, L., & Yuniarti, R. (2018). Model pelatihan leadership berbasis praktik lapangan untuk aparatur desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 3(1), 33–44.
- Mulyadi, A., & Sukmana, A. (2018). Dinamika kepemimpinan lokal dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 3(2), 67–79.
- Nurhadi, E., Rahayu, D., & Arfan, A. (2019). Tantangan akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal*
- Purwanto, A. (2021). Kepemimpinan digital di pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 112–124.
- Putri, F., Zulkifli, & Rahman, S. (2021). Analisis kinerja perangkat desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik*, 9(2), 105–118.
- Rahmadani, D., Yusuf, M., & Fajar, P. (2020). Kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja aparatur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 22–31.
- Ramdani, A., & Yuliani, N. (2020). Pengaruh pelatihan kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja aparatur desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 55–68.
- Rohim, N., & Prasetyo, H. (2017). Pelatihan kepemimpinan untuk peningkatan pelayanan publik di desa. *Jurnal Abdi Negara*, 2(3), 56–67.
- Sari, E., & Mulyana, D. (2020). Kepemimpinan partisipatif dan efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 99–108.
- Siregar, M., & Hasanah, U. (2019). Penerapan pembelajaran kontekstual dalam pelatihan kepemimpinan aparatur desa. *Jurnal Pengabdian dan Pendidikan Masyarakat*, 4(1), 43–54.

- Suprpto, A. (2021). Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur desa dalam era digital. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 6(2), 122–133.
- Sutrisno, D. (2019). Kepemimpinan kepala desa dalam menjaga harmonisasi sosial masyarakat desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 8(2), 155–166.
- Wahyuni, S. (2020). Pengaruh pelatihan kepemimpinan terhadap budaya organisasi pemerintahan desa. *Jurnal Birokrasi dan Kepemimpinan Publik*, 5(1), 40–51.
- Wiyono, S. T. (2021). Public speaking dan kepemimpinan dalam organisasi publik. *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 19(2), 88–99.
- Wulandari, S., Putra, M., & Azhar, R. (2022). Strategi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik Indonesia*, 11(2), 88–101.
- Yulianto, H., & Fauzi, M. (2021). Efektivitas pelatihan kepemimpinan berbasis interaktif untuk aparatur pemerintahan desa. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1), 65–76.
- Wulandari, S., Putra, M., & Azhar, R. (2022). Strategi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Publik Indonesia*, 11(2), 88–101.